

Distribusi Ketenagakerjaan dan Tingkat Kesejahteraan Petani di Pedesaan Agroekosistem Lahan Kering Berbasis Komoditas Palawija

Distribution of Employment and Welfare Levels in The Rural Farmers Dryland Agroecosystem Based Crop Commodities

Sugiarto

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
Jln A. Yani 70 Bogor*

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the aspect labor absorption and prosperity level in dry agroecosystem. This research was taken in PATANAS (Panel Petani National) villages including dry agroecosystem 2008. The data was analyzed by simple statistic and showed using cross tabulation analysis. The result is show that labor absorption in villages is still dominated by agriculture sector, which is changing from under elementary school. Beside that, labor force absorption for younger age is increasing which is showed by movement of the amount of labor from agriculture sector to non agriculture sector. In other hand, the development of prosperity level in the villages is varieties, among in 3 villages no prosperity and 5 villages is prosperity. It means that the availability of labor force which absorption different means of livelihood and the revenue in agro ecosystem wet land didn't show any development than agro ecosystem dry land villages. So that policy to increase farmers property is needed through variety aspect to support revenue development in agriculture and non agriculture sectors, and agriculture commodity price policy which suitable for farmers and also push work climate out of agriculture

Keywords : labor structure, prosperity level household

Diterima: 4-11-2010, disetujui: 30-12-2010

PENDAHULUAN

Program pembangunan berbagai bidang telah dilakukan secara menyeluruh telah membawa perubahan pada struktur ekonomi di pedesaan. Perubahan yang terjadi di pedesaan menyangkut seluruh aspek, diantaranya perubahan penguasaan asset produktif pertanian, struktur kesempatan kerja, pendapatan, pola konsumsi, penggunaan teknologi, dan perubahan kelembagaan pedesaan. Perubahan tersebut membawa dampak positif maupun negatif bagi tatanan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan. Dampak positifnya dapat dilihat dari

peningkatan pendapatan per kapita, tercapainya swasembada beras, peningkatan produksi hasil-hasil pertanian, perkembangan di bidang industri pertanian, dan menurunnya insiden kemiskinan.

Di sisi lain, walaupun dilihat dari persentase penduduk miskin terjadi penurunan dari tahun ke tahun, tetapi secara absolut jumlah penduduk miskin masih sangat besar. Jumlah penduduk miskin sekitar 37 juta yang diperkirakan 24 juta diantaranya berada di wilayah pedesaan dan sekitar 55 persen bergantung pada sektor pertanian (BPS, 2008). Kondisi ini akibat rendahnya pendapatan yang diterima dan rendahnya tingkat produktivitas sehingga upah riil yang diterima juga rendah.

Secara umum, pembangunan pertanian telah berhasil meningkatkan produksi secara fisik. Namun, produktivitas tenaga kerja terutama di subsektor pertanian tanaman pangan dalam dua dekade terakhir tidak mengalami peningkatan yang berarti (Eng, 1993). Menurut Adyana *et al.*, 2000; Nurmanaf *et al.*, 2004; dan Rusastra *et al.*, 2005, menyatakan bahwa di beberapa lokasi penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) dengan basis tanaman pangan, pada lahan sawah (basah) dan lahan kering menunjukkan bahwa jenis pekerjaan tidak lagi didominasi oleh tani seperti di tahun 1988. Jenis pekerjaan di sektor luar pertanian telah menggeser peran sektor pertanian dengan ragam jenis pekerjaan dan kesempatan kerja. Struktur ketenagakerjaan di luar sektor pertanian yang memegang peranan dominan adalah sektor jasa yang dicirikan oleh besarnya kontribusi usaha informal sebagai salah satu pilihan untuk bertahan hidup (Simatupang dan Mardianto, 1986).

Sementara itu, tingkat dan struktur pengeluaran rumah tangga juga terjadi perubahan dari waktu ke waktu atau antardaerah satu dengan yang lainnya, selera, pendapatan, dan lingkungan. Pada dasarnya akses kebutuhan individu terhadap bahan pangan yang dibutuhkan tergantung dari daya beli, tingkat pendapatan, harga pangan, proses distribusi, kelembagaan tingkat lokal, dan kondisi sosial lainnya. Pada kondisi pendapatan yang terbatas, pengeluaran lebih mementingkan kebutuhan konsumsi pangan dibandingkan dengan kebutuhan nonpangan. Namun demikian, dengan pergeseran dan peningkatan pendapatan, proporsi pola pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi pangan akan menurun, sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan akan meningkat.

Seiring dengan kondisi permasalahan ketenagakerjaan, pengeluaran, dan pendapatan yang mereka terima, maka dapat diketahui tingkat kesejahteraannya, apakah mampu untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran rumahtangga baik kebutuhan pangan dan nonpangannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan masukan bagi penentu kebijakan tentang masalah ketenagakerjaan dan distribusi serta tingkat kesejahteraan petani di pedesaan

METODE

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Patanas TA 2007. Penentuan lokasi didapati melalui sampling tipologi lahan dengan menggunakan dua variabel, yaitu tipe lahan pertanian dan jenis komoditas yang diusahakan petani. Data luas lahan dan jenis komoditas berdasarkan pada tingkat produksi di desa, diperoleh dari data BPS tahun 2004. Penentuan basis lahan pertanian dan basis komoditas di setiap desa dilakukan dengan menggunakan LQ (*Location Quotient*) yang memiliki persamaan sebagai berikut:

$$LQ_{xk} = P_{xk}/P_{xp}$$

Keterangan, LQ_{xk} = Koefesien LQ jenis lahan x di desa k
 P_{xk} = Pangsa luas jenis lahan x di desa k
 P_{xp} = Pangsa jenis lahan x di provinsi x

Desa yang memiliki koefesien $LQ > 1$ untuk jenis lahan x menunjukkan bahwa pada tingkat provinsi yang bersangkutan (provinsi p) struktur sumber daya lahan pertanian di desa tersebut relatif terkonsentrasi jenis lahan x. Karena tipologi desa yang dihasilkan mampu menggambarkan keragaman di tingkat nasional, maka perhitungan koefesien LQ sumber daya lahan juga dilakukan pada tingkat nasional. Dengan pendekatan tersebut, maka basis sumber daya lahan di setiap desa dapat diidentifikasi, baik tataran dari provinsi yang bersangkutan maupun tataran nasional.

Hal yang sama juga digunakan dalam mengidentifikasi basis komoditas pertanian, sebagai berikut :

$$LQ_{ik} = P_{ik}/P_{ip}$$

Keterangan, LQ_{ik} = Koefesien LQ jenis lahan i di desa k
 P_{ik} = Pangsa luas tanam komoditas i di desa k
 P_{ip} = Pangsa luas tanam komoditas i di provinsi x

Setelah diperoleh LQ tipe desa dan LQ basis komoditas, selanjutnya dipilih lokasi desa berdasarkan kedua kombinasi LQ tersebut. Desa dengan nilai LQ yang tertinggi akan dipilih menjadi lokasi penelitian.

Untuk memilih lokasi dalam desa yang akan ditetapkan sebagai wilayah sensus, dilakukan dengan memilih blok sensus yang representatif dapat mewakili desa tersebut. Jumlah responden yang terpilih antara 100 hingga 200 rumah tangga. Jumlah desa dan jumlah rumah tangga sensus ada 1108 (Tabel 1). Sementara itu, untuk melihat permasalahan ketenagakerjaan dianalisis dari jumlah reponden terpilih yang ada di dalam hasil sensus. Sedangkan untuk analisis tingkat kesejahteraan dari hasil sensus dipilih 32 rumah tangga dari masing-masing desa dengan metode pengambilan contoh “ *Stratified Random Sampling*”, sehingga total rumah tangga contoh yang diteliti berjumlah 192 rumah tangga.

Tabell. Sebaran desa contoh, rumah tangga sensus, dan sampel pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008.

Propinsi	Kabupaten	Desa	Komoditas Basis	Sensus	Sampel
Lampung	Tulang Bawang	Catur Karya BJ	Ubikayu	110	32
Sulawesi Selatan	Bulukumba	Balleanging	Jagung	97	32
Jawa Timur	Blitar	Bumiayu	Jagung	151	32
Jawa Timur	Blitar	Resongo	Jagung	150	32
Jawa Tengah	Wonogiri	Ngelo	Kacang Tanah	152	32
Jawa Tengah	Pati	Tlogosari	Ubikayu	149	32
Jawa Barat	Garut	Mekarsari	Kacang Tanah	150	32
Jawa Barat	Garut	Sindangmekar	Kedelai	149	32
Jumlah				1108	192

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara langsung dengan responden dalam bentuk kuesioner terstruktur (data primer). Hasil kompilasi di perpustakaan atau informasi instansi terkait (data sekunder). Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dengan tabulasi silang dan time series.

Selanjutnya untuk mengukur permasalahan ketenagakerjaan diperlukan pendekatan, konsep, dan definisi yang mengacu pada Badan Pusat Statistik. Dalam beberapa hal mengenai konsep tenaga kerja menurut BPS, bahwa *persepsi angkatan kerja* didefinisikan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan berstatus bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan persepsi *partisipasi angkatan kerja* adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan seluruh penduduk. *Tingkat partisipasi kerja* adalah sebagai rasio jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. *Kesempatan kerja* adalah rasio jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah penduduk, dan *tingkat pengangguran* rasio jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah penduduk.

Analisis tingkat kesejahteraan diukur melalui konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani (NTPRP). Pengukuran pendapatan total rumah tangga pertanian merupakan penjumlahan dari seluruh nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan petani, nilai dari berburuh tani, nilai hasil produksi usaha nonpertanian, nilai dari berburuh nonpertanian, dan lainnya (iriman dan lain-lain). Sedangkan pengeluaran petani merupakan penjumlahan dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk biaya produksi.

Secara matematis konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NTPRP} &= Y/E \\ Y &= Y_p + Y_{NP} \\ E &= E_p + E_K \end{aligned}$$

Keterangan :

NTPRP = Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Perdesaan

Y = Pendapatan

E = Pengeluaran

Y_p = Total pendapatan dari usaha pertanian

Y_{NP} = Total Pendapatan dari usaha nonpertanian

E_p = Total pengeluaran untuk usaha pertanian

E_K = Total pengeluaran untuk usaha nonpertanian

HASIL PEMBAHASAN

Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

Permasalahan di sektor pertanian tentang partisipasi tenaga kerja adalah relatif tingginya penawaran tenaga kerja terhadap kebutuhan/permintaan serta didukung oleh fleksibilitas pasar tenaga kerja yang memungkinkan adanya setengah pengangguran. Menurut data BPS (2008) bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja secara nasional meningkat dari 66,9% (2007) menjadi 67,3% (2008) yang diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran 9,75% (2007) menjadi 8,46% (2008). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi angkatan kerja. Pertumbuhan kesempatan

kerja dari tahun 2007 hingga tahun 2008 meningkat, di sektor pertanian meningkat 3,6% dan di luar sektor pertanian 1,08%. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian yang terbesar ada di pedesaan yang meningkat dari 36,8 juta jiwa (2007) menjadi 38,2 juta jiwa (2008) atau meningkat 3,7%.

Ditingkat mikro, dengan menganalisis ketenagakerjaan pada basis tanaman palawija di pedesaan menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja mencapai 74,3%, kesempatan kerja (61%), dan tingkat pengangguran 13,3 persen (Tabel 2).

Tabel 2. Jumlah anggota rumah tangga, angkatan kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan patanas tahun 2008

Basis komoditas/ Desa	Partisipasi Kerja			Pengangguran
	Partisipasi Kerja	Kesempatan Kerja	Angkatan Kerja	
1. Resongo	91.7	69.2	75.5	6.3
2. Bumiayu	86.6	70.8	81.7	10.9
3. Tlogosari	77.1	57.5	74.5	17
4. Ngelo	81.2	65.7	80.9	15.2
5. Sindang Mekar	77.1	52	67.4	15.5
6. Mekarsari	78.8	54.5	69.2	14.7
7. Catur KBJ	82.3	62.1	75.5	13.3
8. Balleanging	80.5	54.5	67.7	13.2
Total	82.1	61	74.3	13.3

Sumber: data sensus Patanas, 2008.

Dari hasil penelitian Rusastra, *et al.*, (2005), memperlihatkan bahwa pada tahun 2000-2001 proporsi tenaga kerja setengah pengangguran di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) mencapai 24,72% (19.26 juta orang) dari total kesempatan kerja sektor pertanian. Sedangkan menurut hasil penelitian di desa Patanas seperti Irawan *et al.*, (2007) dan Kustiari *et al.*, (2007) masalah pengangguran tenaga kerja di sektor pertanian berkisar 25-17% dari total rumah tangga yang termasuk katagori angkatan kerja.

Angkatan yang tidak bekerja atau menganggur, diataranya adalah mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja karena belum dapat pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang sekolah, mengurus rumah tangga, tenaga kerja tidak produktif (usia lanjut, jompo) dan bukan angkatan kerja anggota rumah tangga yang berumur dibawah 15 tahun. Beberapa desa yang memiliki tingkat pengangguran adalah desa Tlogosari (17%), kemudian desa Sindang Mekar (15,5%), dan desa Ngelo (15,5%), dan terendah di desa Resongo (6,3%).

Ada beberapa hal yang memengaruhi tingkat partisipasi kerja dan tingkat pengangguran, yaitu; 1) Tingginya tingkat aksesibilitas desa terhadap sumber pertumbuhan ekonomi, 2) Peranan sarana prasarana dan transportasi yang mudah menjangkau ke berbagai sumber mata pencaharian di sektor pertanian dan nonpertanian, 3) Akses penguasaan dan garapan lahan yang marginal yang mendorong untuk melakukan diversikasi ke berbagai sumber mata pencaharian, 4) Tingkat pengetahuan dan pendidikan serta wawasan yang dimiliki yang digunakan untuk memilih jenis pekerjaan yang lebih sesuai, dan 5) Adanya pemutusan hubungan kerja yang kembali ke desa yang akhirnya akan mempengaruhi keseimbangan pasar tenaga kerja di pedesaan (Rusastra *et al.*, 2005)

Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja

Aspek ketenagakerjaan dalam pembangunan pertanian muncul karena rendahnya tingkat produktivitas dan kurang berkembangnya kesempatan kerja, yang dapat mengakibatkan terjadinya arus urbanisasi tenaga kerja muda terdidik ke kota. Di sisi lain, pembangunan ekonomi didominasi oleh penerapan teknologi padat modal dengan penyerapan tenaga kerja kualifikasi tertentu. Sementara itu, sebagian besar tenaga kerja pedesaan hanya memiliki pendidikan dan keterampilan yang terbatas, sehingga tidak mampu bersaing di pasar tenaga kerja.

Salah satu indikator kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan. Kualifikasi tamatan SD merupakan ciri dominan tenaga kerja di pertanian dan pedesaan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian secara mikro di desa Patanas, antara lain Nurmanaf *et al.*, (2004), memperlihatkan bahwa pada agroekosistem lahan sawah irigasi dan lahan kering proporsi tenaga kerja yang terserap di pertanian ada 60 persen yang tamatan SD ke bawah. Tenaga kerja ini perlu ditingkatkan kualitasnya melalui berbagai jenis pendidikan dan pelatihan. Persentase angkatan kerja menurut tingkat pendidikan pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008 disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Jumlah persentase angkatan kerja menurut tingkat pendidikan pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008

Basis Komoditas/ Desa	Tdk/blm Sekolah	Tdk/blm Tmt SD	Tamat SD	Tdk/blm Tmt MP	Tamat SMP	Tdk/Blm SMA	Tamat SMA	Dipl/ PT
1. Resongo	38,5	22,4	32,7	3,2	1,3	0,9	0,9	0,2
2. Bumiayu	6,8	15,7	45	1,2	17,7	1,2	10,9	1,5
3. Tlogosari	12,8	19,1	23,9	5,3	18,1	3,5	14,8	2,6
4. Ngelo	14,6	8,4	41,5	1,2	21,5	2,7	8,2	2
5. Sindang Mekar	4,4	23,2	37,1	3,2	17,8	5,1	7,6	1,7
6. Mekarsari	4	8,1	58,8	2,3	14,4	3	8,3	1,1
7. Catur KBJ	8,7	20,1	37,5	3,4	20,4	1,9	6,2	0,9
8. Balleanging	25,1	22,9	21,5	3,6	13,1	1,5	9,5	2,9
Total	14,5	16,9	38	2,8	15,5	2,5	8,1	1,4

Sumber: data sensus Patanas, 2008.

Pada Tabel 3, memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di pedesaan pada basis komoditas tanaman palawija ada 69,4 persen yang berpendidikan SD tamat kebawah. Beberapa desa dengan jumlah penduduk tamatan SD ke bawah berturut-turut adalah desa Resongo (93,6%), Mekar Sari (70,9%), Balleanging (69,5%) dan Ngelo (64,5%), Sementara itu, keterlibatan tenaga kerja di sektor pertanian dengan produktivitas rendah diiringi dengan keterlibatan tenaga kerja muda dengan pendidikan tinggi untuk masuk pada pasar tenaga kerja di sektor pertanian, dikarenakan: a) terbatasnya kesempatan kerja pertanian bagi yang berpendidikan tinggi, b) sektor pertanian umumnya tidak mendatangkan pendapatan dalam waktu singkat, c) usaha pertanian mengandung banyak resiko, d) pendapatan di sektor pertanian lebih rendah dari yang diharapkan, dan e) kurang status sosial dan kenyamanan kerja, karena kesan usaha pertanian yang kumuh (Dewa, 2000).

Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur

Persentase angkatan kerja menurut kelompok umur dan sektor pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008 disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Jumlah persentase angkatan kerja menurut kelompok umur dan sektor pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008 (%)

Basis Komoditas/ Desa	Sektor Pertanian dan Kelompok Umur						Sektor Non Pertanian dan Kelompok Umur					
	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	> 55	Juml	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	> 55	Juml
1. Resongo	16,8	27,0	24,0	13,1	7,9	88,8	2,8	3,5	2,1	1,2	1,6	11,2
2. Bumiayu	7,3	11,7	23,1	19,6	21,9	83,6	1,5	7,6	4,1	2,0	1,2	16,4
3. Tlogosari	8,5	13,4	17,0	14,1	15,4	68,5	6,6	11,5	8,5	3,0	2,0	31,5
4. Ngelo	3,9	9,2	21,0	16,0	18,8	68,9	10,9	10,1	7,0	2,4	0,7	31,1
5. Sindang Mekar	1,6	11,7	16,1	15,5	14,9	59,8	14,9	10,4	7,9	4,1	2,8	40,2
6. Mekarsari	9,3	13,1	12,8	13,8	17,6	66,7	8,3	6,7	8,0	5,4	4,8	33,3
7. Catur KBJ	14,6	17,2	20,3	14,6	14,2	80,8	9,6	3,1	3,4	1,1	1,9	19,2
8. Balleanging	12,1	26,9	18,8	19,7	14,3	91,9	2,2	3,6	1,8	0,4	0,0	8,1
Total	9,1	16,0	19,5	15,6	15,6	75,8	7,2	7,3	5,4	2,5	1,9	24,2

Sumber: data sensus Patanas, 2008.

Tabel 4 mengelompokkan angkatan kerja menurut rangking sepuluh tahunan dan pekerjaan menurut sektor, tabel tersebut menunjukkan bahwa angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian ada 75,8% yang terdiri atas 44,6% termasuk pada kelompok usia produktif (umur 15-44 tahun) dan 31,2 persen pada usia non produktif (>45 tahun). Sedangkan di luar sektor pertanian usia produktif ada 19,9% dan usia tua 4,4%.

Komposisi kelompok umur nonproduktif di sektor pertanian, terutama pada usia tua yang disebut dengan *aging farmer* dapat mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas sektor pertanian. Walaupun fenomena *aging farmer* dengan produktivitas rendah, tetapi dapat mengindikasikan bahwa petani yang lebih tua memiliki kapabilitas manajerial lebih tinggi sehingga dalam konteks tersebut unsur pengalaman lebih berperan dibanding pada angkatan kerja usia produktif. Permasalahan di sektor pertanian dengan komposisi kelompok umur usia tua akan merupakan beban yang berat dengan produktivitas yang rendah. Menurut Susilowati, (2001) hubungan antara tenaga kerja usia tua dengan produktivitas usaha tani bersifat negatif, yang mengindikasikan petani yang lebih tua memiliki kapabilitas manajerial lebih tinggi sehingga dalam konteks tersebut unsur pengalaman lebih berperan. Hal ini sesuai dengan hasil kajian Nurmanaf *et al.*,(2004), Rusastra *et al.*, (2005), bahwa proporsi tenaga kerja di sektor pertanian cenderung didominasi oleh tenaga kerja yang berumur 25-45 tahun. Sementara itu, tenaga muda lebih cenderung mengisi kesempatan kerja diluar sektor pertanian.

Perbandingan antara angkatan kerja produktif pada usia 45 tahun ke bawah dari masing-masing desa, memperlihatkan bahwa jumlah angkatan kerja di desa Sindang Mekar lebih banyak yang bekerja di luar sektor pertanian daripada di sektor pertanian. Di lain pihak jumlah penyerapan angkatan kerja pada usia produktif 45 tahun ke bawah di sektor pertanian, akan dapat diharapkan mampu menunjang pembangunan pertanian dengan konsekuensi memerlukan kebijakan melalui berbagai program yang mengarah pada pengembangan industri pertanian yang selaras dengan perkembangan industri di luar pertanian sebagai alternatif penampung tenaga kerja.

Beberapa kebijakan strategis untuk mendorong minat tenaga kerja produktif ke sektor pertanian adalah: 1) Mendorong pengembangan agroindustri sehingga peningkatan nilai tambah dan produktivitas tenaga kerja pertanian, 2) Meningkatkan intensitas pemanfaatan teknologi dan mekanisasi pertanian, sehingga dapat meningkatkan citra pertanian dan minat generasi muda untuk mengembangkan sektor pertanian, 3) Pengembangan fasilitas peningkatan kemampuan manajemen dan kewirausahaan SDM, sehingga mampu mengelola usaha secara efisien, produktif, dan kompetitif, serta 4) Peningkatan skala usaha pertanian yang mampu mendukung kesejahteraan pengelolaannya dan setara dengan sektor nonpertanian.

Angkatan Kerja Menurut Sumber Matapencarian

Bagi sebagian besar penduduk di pedesaan, secara umum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bergantung pada salah satu sumber matapencarian saja, namun melakukan beberapa kegiatan ganda baik itu pada sektor pertanian maupun sektor non pertanian.

Menurut beberapa hasil penelitian di pedesaan Patanas diantaranya oleh Suryana (1989), Adyana (2000), Susilowati, *et al.*, (2001), Nurmanaf, *et al.*, (2004), Rusastra, *et al.*, (2005), mengemukakan bahwa kegiatan rumah tangga di pedesaan sangat beragam, tidak hanya terkonsentrasi di sektor pertanian saja, namun juga terdiversifikasi dengan sektor di luar sektor pertanian. Persentase rumahtangga menurut jumlah sumber pendapatan di pada basis lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008 disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Persentase rumah tangga menurut jumlah sumber pendapatan di pada basis lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008

Desa	Jumlah Sumber Pendapatan					Total
	1	2	3	4	>4	
Resongo	6,3	9,4	37,5	34,4	12,5	100
Bumiayu	12,9	6,5	48,4	22,6	9,7	100
Tlogosari	6,3	9,4	46,9	37,5	0,0	100
Ngelo	0,0	4,2	16,7	45,8	33,3	100
Sindangmekar*	4,2	4,2	33,3	37,5	20,8	100
Mekarsari	9,1	22,7	9,1	27,3	31,8	100
Catur Karya Buana Jaya	8,0	52,0	12,0	12,0	16,0	100
Balleanging	0,0	0,0	47,4	47,4	5,3	100

Sumber: data sensus Patanas, 2008.

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa rumah tangga yang hanya mempunyai satu sumber pendapatan berkisar antara 4,2% (Desa Sindangmekar) sampai 12,9% (Desa Bumiayu). Sedangkan di Desa Ngelo, dan Balleanging tidak terdapat rumah tangga yang hidup hanya dari satu sumber pendapatan. Hal ini terjadi karena di desa-desa tersebut memiliki aksesibilitas yang tinggi serta kegiatan sektor non pertanian yang sudah relatif maju, misalnya desa Ngelo adalah desa relatif yang dekat dengan kota Wonogiri. Sebagian besar rumah tangga di desa-desa penelitian mempunyai 2-3 sumber pendapatan. Hanya sebagian kecil rumah tangga yang mempunyai lebih dari empat sumber pendapatan. Di Desa Mekarsari dan Ngelo terdapat sekitar 30% dari rumah tangga contoh yang mempunyai lebih dari empat sumber pendapatan diversifikasi sumber pendapatan ini diduga didorong oleh kegiatan sektor nonpertanian.

Jumlah persentase angkatan kerja yang bekerja menurut jenis pekerjaan pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008 disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6. Jumlah persentase angkatan kerja yang bekerja menurut jenis pekerjaan pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008

Desa	Sumber mata pencaharian (%)									
	Usaha Pertanian	Buruh Pertanian	Buruh Industri	Dagang	Pekerja Bangunan	Pekerja Jasa	Usaha Industri	Ang katan	Peg/tata laksana	Lainya
1. Resongo	79,5	9,3	1,4	2,8	1,6	0,9	2,1	1,2	0,2	0,9
2. Bumiayu	78,4	2	3,1	6,2	3,1	1,7	1,1	1,4	1,7	1,4
3. Tlogosari	48,3	20,8	2,8	6,9	0,9	6	4,1	0,6	8,5	0,9
4. Ngelo	66,7	2,2	4,4	4,6	14,2	4,2	0,7	0,7	2	0,4
5. S. Mekar	51	9,2	3,2	7	1,6	22	1,9	0,6	1,6	1,9
6. Mekarsari	43,3	23,7	4,8	10,3	3,8	2,9	1,9	3,5	3,2	2,6
. Catur KBJ	68,2	12,6	5,4	3,1	0	7,3	0,8	1,5	0	1,1
. Balle-anging	82,1	9,9	0	0,9	0	0,4	0,9	0,9	4	0,9
Total	65	10,5	3,2	5,3	3,9	5,5	1,7	1,3	2,5	1,2

Sumber: data sensus Patanas, 2008.

Pada Tabel 6, memperlihatkan bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja didominasi oleh sumber mata pencaharian pada usaha pertanian (65%) dan kegiatan berburuh tani (10,5%). Sedangkan sumber mata pencaharian yang lain seperti di sektor nonpertanian menyebar pada seluruh sumber mata pencaharian dengan kisaran di bawah 10%. Desa yang dominan dengan sumber mata pencaharian adalah desa Balleanging (82,1%) dan desa Resongo (79,5%). Sebaliknya, desa yang dominan dengan mata pencaharian di sektor nonpertanian adalah desa Tlogosari (30,7%) dan desa Sindang Mekar (39,8%).

Secara umum, bervariasinya sumber mata pencaharian dari masing-masing desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) adanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang semakin terbuka, 2) sarana transportasi yang semakin lancar dan komunikasi yang semakin luas, membuka peluang untuk akses bekerja diluar sektor pertanian atau pun di luar batas administrasi wilayah hingga ke luar negeri, 3) tingkat pendidikan atau keterampilan dari sebagian tenaga muda di pedesaan mendorong untuk bekerja di luar sektor pertanian, dan 4) semakin terbatasnya kesempatan kerja dan pemilikan aset produktif yang semakin sempit akan membatasi pola usaha yang lebih produktif dibandingkan sektor non pertanian yang cenderung terbuka (Rusastra *et al.*, 2005).

Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani

Secara agregat pendapatan rumah tangga petani diperoleh dari dua sumber pendapatan, yaitu dari sektor pertanian dan nonpertanian. Sumber pendapatan pertanian yang terdiri atas usaha pertanian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu usaha tani sawah/tegal, usaha tani kebun dan pekarangan serta usaha ternak, dan di luar usaha pertanian, seperti berburuh tani. Sumber pendapatan nonpertanian terdiri atas usaha nonpertanian (dagang, industri, angkutan, dan jasa), Pegawai Negeri/TNI, pendapatan dari sumbangan dan lain-lain.

Struktur pendapatan rumah tangga petani di pedesaan berbasis agroekosistem lahan kering di pedesaan tahun 2008 disajikan dalam tabel 7.

Tabel 7. Struktur pendapatan rumah tangga petani di pedesaan berbasis agroekosistem lahan kering di Pedesaan tahun 2008.

Desa	Pertanian (%)			Non Pertanian (%)					
	Usaha Pertanian	Buruh Pertanian	Sub Total	Buruh Nonpertanian	Karyawan	Usaha	Jasa	Lain-Lain-	Sub Total
1. Resongo	53,4	5,3	58,7	4,2	2	18,2	4,2	12,7	41,3
2. Bumiayu	53	5	58	4,6	2,5	4,7	22,1	8,1	42
3. Tlogosari	16,1	5,2	21,3	6,2	6,3	55,2	1,5	9,5	78,7
4 Ngelo	31,6	2,8	34,4	20,8	3,5	18,2	13,1	10	65,6
5. S. Mekar	17	1,7	18,7	3,3	2,1	38,8	33,9	3,2	81,3
6. M Sari	25,9	21,1	47	15,1	5,4	15,7	2,5	14,3	53
7. Catur KBJ	68,4	12,6	81	2	0	4,9	0,2	11,9	19
8. B. Anging	47,4	9,9	57,3	0,2	23,3	6,5	2,4	9,3	41,7

Sumber: data Patanas, 2008.

Pada Tabel 7, menunjukkan bahwa sumber pendapatan di luar sektor pertanian yang tertinggi adalah desa Sindang Mekar (81.3%), desa Tlogosari (78,7%) dan desa Ngelo (65,6%) sementara desa lainnya memiliki pendapatan di sektor luar pertanian hanya di bawah 50%. Hal ini terjadi karena di desa-desa tersebut memiliki aksesibilitas yang tinggi serta kegiatan sektor nonpertanian yang sudah relatif maju, seperti desa Ngelo adalah desa relatif yang dekat dengan kota Wonogiri. Rendahnya pendapatan di sektor pertanian, sesuai dengan beberapa hasil penelitian, peran relatif sumber pendapatan di sektor pertanian dan pedesaan mengalami penurunan di bawah 50% yang diikuti dengan meningkatnya peran pendapatan diluar sektor pertanian antara 35% hingga 50% (Nurmanaf *et al.*, 2004; Kasryno, 2000). Hal ini memberikan indikasi bahwa peran sektor pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama bagi petani di pedesaan dan tulang punggung perekonomian di pedesaan dalam menyerap angkatan kerja, bukan hanya bagi petani *land less* atau tunawisma, tetapi dapat membuka peluang kerja pada segmen agribisnis bagi angkatan kerja yang masuk dalam pasar tenaga kerja. Salah satu sumber pendapatan yang menyumbangkan pendapatan di sektor pertanian selain yang berdasarkan *land base* adalah usaha ternak besar, seperti di desa Resongo, desa Catur Karya Buana Jaya, dan desa Ngelo. Hal ini berarti masih ada potensi pada daerah lahan kering untuk meningkatkan pendapatan petani dengan cara memacu kegiatan pertanian “*non land base*” dengan menggalakkan usaha peternakan.

Salah satu kegiatan di luar sektor pertanian yang ada di semua desa adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan usaha (dagang, bangunan, dan angkutan) baik itu dilakukan dengan skala usaha kecil atau besar, seperti di desa Tlogosari (55,2%) dan desa Sindang Mekar (38%), sementara itu pendapatan dari kegiatan jasa, seperti di desa Sindang Mekar (38,8%) dan desa Bumiayu (22,1%). Pada umumnya, usaha industri yang dilakukan masih bersifat sederhana baik alat yang dipergunakan maupun rancang-bangunnya.

Pendapatan dari kegiatan berburuh nonpertanian yang tertinggi adalah di desa Ngelo (20%) dan desa Mekarsari (15%). Pendapatan yang diterima setahun dari kegiatan ini pada umumnya adalah sebagai tukang bangunan, seperti tukang kayu dan tukang batu. Kegiatan berburuh nonpertanian sebagai tukang bangunan adalah kegiatan yang hanya bersifat temporer tergantung pada kesempatan kerja.

Struktur Pengeluaran Rumah Tangga

Struktur Pengeluaran Rumah tangga Petani pada Basis Agroekosistem Lahan Kering di Pedesaan Patanas tahun 2008 disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Struktur pengeluaran rumah tangga petani pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan patanas tahun 2008.

Desa	Pengeluaran				Total (Rp 000)
	Bahan Makanan		Bahan Non Makanan		
	(%)	(Rp 000)	(%)	(Rp 000)	
1. Resongo	88,7	7.601,2	11,3	970,2	8.571,4
2. Bumiayu	86,1	7.863,9	13,9	1.273	9.136,9
3. Tlogosari	85,6	7.957,8	14,4	1.336,1	9.293,9
4 Ngelo	85,8	5.937,3	14,2	981,8	6.919,1
5. Sindang Mekar	84,8	8.359,2	15,2	1.497,2	9.856,5
6. Mekar Sari	87,4	5.082,5	12,6	731,2	5.813,7
7. Catur KBJ	87	8.261	13	1.231	9.492
8. Balle Anging	85,8	5.062,7	14,2	910,2	6.412,9

Sumber: data Patanas, 2008.

Pada Tabel 8 memperlihatkan bahwa jumlah pengeluaran antara konsumsi pangan dengan nonpangan dari masing-masing desa masih didominasi oleh pengeluaran untuk konsumsi pangan berkisar 85% dan nonpangan berkisar 15% dari total pengeluaran rumah tangga. Akan tetapi, dari masing-masing komponen pendukung kelompok pengeluaran, seperti pengeluaran untuk konsumsi pangan lebih didominasi oleh konsumsi karbohidrat, konsumsi protein, dan konsumsi pangan pelengkap dengan jumlah yang relatif sama. Kecuali konsumsi buah dan sayur di desa Resongo (32%), dengan jumlah pengeluaran lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya. Bahkan lebih besar dari konsumsi karbohidrat pada kelompok pengeluaran bahan makanan. Sementara itu, pada kelompok pengeluaran nonpangan yang paling dominan dari masing-masing desa adalah pengeluaran untuk bahan bakar yang berkisar antara 4% hingga 6% dari total pengeluaran rumah tangga, sedangkan proporsi pengeluaran yang lainnya, kurang dari 3%.

Tingkat kesejahteraan rumah tangga

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah konsep nilai tukar pendapatan rumah tangga yang merupakan nisbah antara pendapatan rumah tangga dari berbagai sektor dengan seluruh pengeluaran rumah tangga yang terdiri atas pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan serta pengeluaran untuk produksi seperti biaya usaha tani dan usaha di luar pertanian maupun kegiatan berburuh (Racmat *et al.*, 2000).

Pendapatan rumah tangga petani, baik yang berasal dari sektor pertanian maupun nonpertanian, mempunyai pola yang sama dengan sumber pendapatan yang didominasi oleh sektor pertanian, kecuali di desa Sindang Mekar yang pendapatan di luar pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan pertanian. Pada umumnya sumber pendapatan di sektor pertanian didukung oleh pendapatan usaha pertanian (usahatani padi, palawija, peternakan, dan kebun) yang lebih besar dari pendapatan usaha nonpertanian (usaha dagang, jasa, industri, dan angkutan). Hal ini berarti ada hubungan antara besarnya pengeluaran terhadap pendapatan yang diterima rumah tangga petani dengan kegiatan usaha yang lebih menguntungkan.

Nilai tukar pendapatan rumah tangga pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008 disajikan dalam tabel 9.

Tabel 9. Nilai tukar pendapatan rumah tangga pada basis agroekosistem lahan kering di pedesaan Patanas tahun 2008

Desa	Nilai Tukar Pendapatan Rumahtangga Terhadap				
	Total Pengeluaran	Total Konsumsi	Konsumsi Pangan	Konsumsi Non Pangan	Biaya Produksi
1. Resongo	1,12	1,8	2	15,9	3
2. Bumiayu	1,48	2,2	2,5	15,6	4,6
3. Tlogosari	1,31	1,9	2,2	13,3	4,2
4. Ngelo	1,32	2,3	2,7	16,2	3,1
5. Sindang Mekar	1,67	3,1	3,7	20,5	3,6
6. Mekar Sari	0,89	1,6	1,9	12,8	2
7. Catur KBJ	0,99	1,7	1,9	12,8	2,5
8. Balle Anging	0,98	2,2	2,6	15,5	1,8

Sumber: data Patanas, 2008.

Sementara itu, dari hasil analisa nilai tukar pendapatan rumah tangga, menunjukkan bahwa Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (NTPRP) terhadap total pengeluaran dari masing-masing desa berbeda. Desa Mekar Sari, Catur Karya Buana Jaya, dan Balleanging besarnya nilai tukar di bawah satu. Sedangkan desa lainnya besarnya nilai tukar yang diperoleh lebih dari satu. Artinya, bagi desa-desa dengan NTPRP kurang dari satu dapat dikategorikan belum sejahtera, sedangkan desa-desa dengan NTPRP di atas satu masuk kategori sejahtera. Rendahnya NTPRP yang diperoleh ($NTPRP < 1$), disebabkan oleh total pengeluaran yang terdiri atas pengeluaran untuk konsumsi (pangan dan bukan makanan) dan biaya produksi yang lebih besar dari total pendapatan. Di lain pihak NTPRP terhadap total konsumsi dari seluruh desa lebih besar dari satu (1,6-3,1) dan lebih kecil terhadap NTPRP biaya produksi (1,8-4,6). Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga petani lebih banyak mengeluarkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dibandingkan dengan kebutuhan usahanya. Namun, diantara pengeluaran untuk konsumsi, lebih banyak mengeluarkan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan dibandingkan dengan bukan makanan. Hal ini dapat dilihat dari nilai NTPRP konsumsi nonpangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan NTPRP konsumsi pangan.

KESIMPULAN

Penyerapan angkatan kertja di tingkat pedesaan menunjukkan partisipasi angkatan kerja rumah tangga berkisar 74% dan tingkat pengangguran 13,3%. Hal ini berarti bahwa penyerapan angkatan kerja di pedesaan belum diimbangi dengan besarnya tingkat pengangguran yang akan menjadi salah satu penyebab lambannya penyerapan tenaga kerja di pedesaan.

Partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pendidikan di pedesaan didominasi oleh angkatan kerja tamatan SD ke bawah, yang lebih mengutamakan phisik dan pengalaman sebagai bekal untuk mengisi kesempatan kerja di sektor pertanian. Namun demikian, pada beberapa desa tertentu telah terjadi pergeseran penyerapan angkatan kerja ke arah pendidikan yang lebih tinggi di atas tamatan SD.

Tingkat partisipasi angkatan kerja rumah tangga yang bekerja di pedesaan didominasi oleh mereka yang bekerja disektor pertanian dibandingkan dengan diluar sektor pertanian. Jenis

pekerjaan di sektor pertanian yang utama adalah mereka yang bekerja pada usaha pertanian, baik itu yang berdasarkan *land base* maupun *nonland base* dan buruh tani. Sedangkan di luar sektor pertanian terdiversifikasi kepada beberapa jenis usaha, yang paling dominan adalah pekerja jasa atau perdagangan.

Dilihat dari aspek pendapatan rumah tangga petani yang paling dominan adalah pendapatan dari sektor pertanian dibandingkan dengan sektor nonpertanian. Pendapatan di sektor pertanian yang terbesar pada umumnya dari usaha pertanian, terutama hasil dari usaha tani padi, kemudian usaha ternak dan usahatani lainnya. Sementara itu pendapatan di sektor nonpertanian lebih banyak dari kegiatan usaha nonpertanian, utamaterutama dari usaha dagang kemudian usaha lainnya. Pada kondisi ini dapat diindikasikan bahwa petani padi di dalam memperoleh pendapatan masih berorientasi pada *land base* sebagai sumber mata pencaharian.

Dilihat dari aspek pengeluaran, pengeluaran untuk bahan makanan lebih besar dalam anggaran pengeluaran rumah tangga dibandingkan dengan bahan bukan makanan. Pengeluaran bahan makanan pokok, seperti sumber karbohidrat lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran bahan makanan lainnya. Namun demikian, pada kelompok pendapatan yang semakin tinggi, terjadi pergeseran konsumsi beras yang cenderung menurun dan digantikan oleh bahan makanan selain karbohidrat, seperti bahan makanan yang mengandung protein, mineral, atau vitamin. Pengeluaran konsumsi bukan makanan dari masing-masing desa memperlihatkan bahwa pengeluaran bahan baker dan energi lebih besar daripada kebutuhan lainnya.

Nilai tukar pendapatan rumah tangga (NTPRP) digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan rumah tangga petani. Ada 3 desa dengan NTPRP kurang dari satu yang masuk ke dalam kategori kurang sejahtera dan 5 desa lainnya di atas satu yang masuk ke dalam kategori sejahtera. Bervariasinya NTPRP dari masing-masing desa dipengaruhi oleh kelompok pendapatan terhadap total pengeluaran, baik dari total konsumsi makanan dan bukan makanan, maupun biaya usaha.

Sebagai saran kedepan, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di pedesaan yang berorientasi pembangunan pertanian, baik itu melalui peningkatan ketrampilan dan pengetahuan yang didukung dengan pembinaan, penyuluhan dan penguatan permodalan. Disamping itu, perlu pengembangan agribisnis atau agroindustri yang berbasis pada sumber daya alam setempat yang dapat diharapkan mampu menyerap tenaga kerja didalam desa dan bersaing di pasar tenaga kerja

Di dalam meningkatkan NTPRP dapat dilakukan dengan peningkatan harga jual komoditas yang layak diterima petani, meningkatkan skala usaha pertanian yang berkelanjutan, menghilangkan kendala penerapan teknologi, pengendalian harga sarana produksi, meminimalkan pengaruh *external* untuk menghindari resiko, serta mendorong iklim usaha di luar pertanian yang lebih kondusif bagi rumah tangga petani sebagai penyedia tenaga kerja dan modal terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M. O., Sumaryanto, M. Rachmat, R. Kustiari, S. H. Susilowati, Supriati, E. Suryani and Suprpto. 2000. *Assesing the Rural Development Impact of the Crisis in Indonesia*. CASER, Bogor, Indonesia and The Wold Bank Washington, D. C. Biro Pusat Statistik. *Berbagai Tahun (2000-2003)*. Jakarta.

- BPS. 2007. Survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. 2008. Statistik Pertanian. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Dewa, K. S. 2000. Dinamika Pasar tenaga Kerja Struktur Upah dan Harga di Pedesaan. Makalah disajikan pada seminar rutin Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Eng, P. Van Der.1993. Agricultral Growth in Indonesia Since 1880. Productivity Change and the Impact Policy Unversitei Sdurukkerij. Groningen.
- Kasryno, F. 2000. Membangun Kembali Sektor Perrrtanian dan Kehutanan. Makalah Seminar Nasional “ Prespective Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2000 ke Depan. Bogor 9-10 Nopember 2000.
- Nurmanaf. A. R., A. Djulin., Sugiarto., Herman S., Supadi., N. K. Agustina., J. F. Sinuraya dan Gelar.S. B. 2004. Dinamika Sosial Ekonomi Rumahtangga dan Masyarakat Pedesaan: Analisa Profitabilitas Usahatani Dan Dinamika Harga dan Upah Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Racmat. M, Supriyati. D. Hidayat, J. Situmorang. 2000. Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Pertanian dan Komoditas Pertanian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Rusastra I.W., Khairina M. N., Supriyati, Erma S., Mohamad S., dan Rosganda E. 2005. Analisis Ekonomi Ketenagakerjaan Sektor Pertanian dan Pedesaan di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembanagn Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Simatupang, P. dan S. Mardianto. 1986. Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kurs Valuta Asing Terhadap Transformasi Struktur Perekonomian di Indonesia. Prosiding Seminar Nasinal Perhepi, Pertanian dan Pedesaan Indonesia dalam Trnasisi: Reflekdi dan Prospektif, PERHEPI, Jakarta.
- Suryana, A. 1989. Perspektif Mobilitas Kerja dan Kesempatan Kerja Pedesaan. Dalam Proseding Patanas. Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Susilowati, S. H. 2001. Dinamika Ekonomi Pedesaan. Pusat Penelitan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.